

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan
1.	Pelayanan Banding Perkara Perdata	<ul style="list-style-type: none"> Het Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengubah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Perdata	90 hari	Banding Perdata Rp.150.000, sebagai PNPB	Putusan Perdata	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id
2.	Pelayanan Banding Perkara Pidana	<ul style="list-style-type: none"> UUD Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pidana	90 hari	Bebas Biaya	Putusan Pidana	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id
3.	Pelayanan Banding Perkara Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	<ul style="list-style-type: none"> UUD Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	90 hari	Bebas Biaya	Putusan Pidana Khusus Tipikor	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id
4.	Pelayanan Perkara Banding Pidana Anak	<ul style="list-style-type: none"> UUD Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pidana Anak	45 hari	Bebas Biaya	Putusan Pidana Anak	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id
5.	Pelayanan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> Permenpan & RB No. 47 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 02 tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 70/KPT.W10- U/SK.KP3.2.1/V/2024 tentang Penunjukan Petugas Penanganan Pengaduan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 167/KPT.W10- U/T1.1.1/X/2024 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Hukum dan Pengaduan (SI-PITUNG) 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi Form Pengaduan secara tertulis disampaikan melalui surat maupun langsung ke meja pengaduan/PTSP; Atau dapat mengisi form elektronik pada aplikasi pengaduan yang terdapat pada website: https://pt-jakarta.go.id/go.id (Aplikasi SIWAS); 	Sesuai Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/OT.01.3/3/2022	25 hari kerja	Bebas Biaya	Surat Keputusan / Rekomendasi	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id
6.	Pelayanan Permohonan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 14 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum SK Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 2A Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Pengadilan Tinggi Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir yang disediakan; Menyerahkan KTP atau identitas lainnya; Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan. 	Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Informasi	25 hari kerja Pemberian Informasi tanpa keberatan yaitu 5 jam kerja Pemberian informasi dengan keberatan yaitu 9 jam kerja	Bebas Biaya	Penyalinan atas informasi yang diminta	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id
7.	Pelayanan Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor W10- U/8/KP.07.01/1/2022 tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Permohonan Riset 	<ol style="list-style-type: none"> Proposal dari mahasiswa yang bersangkutan; Surat pengantar dari kampus; Surat rekomendasi dari Kesbangpol Provinsi Non Penelitian. 	Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penelitian/Riset	1 hari kerja	Bebas Biaya	Surat Keterangan /Surat Riset	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id
8.	Penyempahan Advokat	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 153/KPT.W10- U/SK.HK.00.4/IX/2024 Tentang Penunjukan Verifikator dan Panitia Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Advokat di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM milik Organisasi Advokat yang mengajukan penyempahan; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta dan sudah berusia 25 Tahun; Surat Keterangan Magang 2 Tahun Berturut – turut pada kantor Advokat; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang resmi dikeluarkan Polri; Surat Keterangan tidak pernah di pidana atau diancam hukuman pidana 5 Tahun dari Pengadilan Negeri domisili setempat; Surat Pernyataan tidak berstatus PNS, TNI Polri, Notaris, Pejabat Negara (Bermaterai); Fotocopy ijazah Sekolah Tinggi Hukum Dilegalisir basah dan bukan hasil scanner; Fotocopy pendidikan khusus profesi advokat (PKPA); Fotocopy sertifikat pelatihan advokat dan lulus ujian advokat yang dilegalisir organisasi; Fotocopy SK pengangkatan advokat dari organisasi bersangkutan; Surat Keterangan yang menerangkan bahwa dokumen yang diupload sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh pimpinan organisasi. 	Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyempahan Advokat	19 hari	Rp. 10.000,- sebagai PNPB Materai	BA Sumpah/ Database e-Court	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id Aplikasi e-SIPPA (elektronik sistem informasi permohonan penyempahan advokat) Aplikasi e-Court
9.	Verifikasi Pengguna Terdaftar e-Court	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik SK KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun e-Court; Mengunggah dokumen elektronik (PDF) e-KTP pada akun e-Court; Mengunggah dokumen elektronik (PDF) Kartu Tanda Anggota Advokat (KTA) pada akun e-Court; Mengunggah dokumen elektronik (PDF) Berita Acara Sumpah Advokat pada akun e-Court. 	Melakukan pemeriksaan identitas pada data advokat yang melakukan pendaftaran akun pada e-Court; Melakukan verifikasi apabila data yang diupload dengan data arsip penyempahan advokat yang bersangkutan sesuai.	1 hari kerja (1x24 jam)	Bebas Biaya	Akun e- court yang telah terverifikasi	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id Aplikasi e-Court
10.	Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/ VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki akun terdaftar Memiliki email atau nomor WhatsApp Memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP atau passport 	Perpanjangan penahanan oleh KPT atau WKPT Pasal 29(1) dan (2) Laporan penahanan Banding Pasal 27(1)	3 hari kerja	Bebas Biaya	Akun e- Berpadu yang telah terverifik asi	Website: www.pt-jakarta.go.id SIWAS MARI: www.siwas.hkamahagung.go.id

KETUA,

 HERRI SWANTORO